



Analisis Janji Politik Jokowi dan Realisasi 10 Tahun Kepemimpinannya (Studi Kasus PT. Pertamina Persero)

Ilham Rido Mahendra

UIN Raden Fatah Palembang

Kun Budianto

UIN Raden Fatah Palembang

Deany Afriany

UIN Raden Fatah Palembang

Alamat: Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.Km.3, RW.05, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang

Korespondensi penulis: ilhamridomahendra@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze Joko Widodo's (Jokowi) political promises during the 2014 Presidential Election related to the energy sector, particularly PT Pertamina (Persero), and to assess the realization of these promises over his ten years in office. The focus of the study is directed at the promises of building new oil refineries, strengthening Pertamina's role as the main oil and gas operator, and the target of surpassing Petronas. The method used is descriptive qualitative research with literature study techniques. Data were obtained from official government documents, presidential speeches, Pertamina's annual reports, as well as academic literature and mass media publications. Data analysis was conducted through reduction, presentation, and conclusion drawing based on the Miles & Huberman model. This study employs the Political Promise theory by Robert Thomson with the concept of Constraining Dissensus, as well as Elin Naurin's theory on the functions of political promises (signaling, differentiation, and the degree of specificity). These theories are used to understand the dynamics between campaign promises and policy realization in the context of democracy. The findings show that Jokowi's promises were mostly realized only partially. The RDMP and GRR programs, which were targeted to increase refinery capacity to 2 million barrels per day, experienced significant delays and by 2024 had not yet been fully operational. Pertamina's oil production also did not reach the promised national dominance. Financially, Pertamina recorded a net profit of approximately Rp71.55 trillion in 2023, but it still lagged far behind Petronas, which reported around Rp257.25 trillion. Thus, the promise of making Pertamina larger than Petronas has not yet been realized.*

Keywords : Janji Politik, Jokowi, Pertamina

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis janji politik Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu 2014 terkait sektor energi, khususnya PT Pertamina (Persero), serta menilai realisasi janji tersebut dalam sepuluh tahun kepemimpinannya. Fokus kajian diarahkan pada janji pembangunan kilang minyak, penguatan peran Pertamina sebagai operator migas utama, serta target untuk melampaui Petronas. Metode yang

Received Oktober 10, 2025; Revised Oktober 16, 2025; Accepted Oktober 29, 2025

*Ilham Rido Mahendra, ilhamridomahendra@gmail.com

digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik studi literatur. Data diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, pidato Presiden, laporan tahunan Pertamina, serta literatur akademik dan publikasi media massa. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan menurut model Miles & Huberman. Penelitian ini menggunakan kerangka teori Janji Politik (*Political Promise*) dari Robert Thomson dengan konsep *Constraining Dissensus*, serta teori fungsi janji politik dari Elin Naurin (signaling, differentiation, dan tingkat kekhususan janji). Teori ini digunakan untuk memahami dinamika antara janji kampanye dan realisasi kebijakan dalam konteks demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa janji Jokowi sebagian besar hanya terealisasi parsial. Program RDMP dan GRR yang ditargetkan menambah kapasitas kilang hingga 2 juta barel per hari mengalami keterlambatan signifikan, sehingga hingga 2024 belum beroperasi penuh. Produksi minyak Pertamina juga tidak mencapai dominasi nasional yang dijanjikan. Secara finansial, Pertamina berhasil membukukan laba bersih Rp71,55 triliun pada 2023, tetapi masih tertinggal jauh dari Petronas yang mencatat Rp257,25 triliun sehingga janji untuk membuat Pertamina lebih besar dari Petronas masih belum terealisasikan.

Kata Kunci : Janji Politik, Jokowi, Pertamina

LATAR BELAKANG

Pemilihan umum merupakan wujud demokratisasi yang menjadi manifestasi paling jelas dari partisipasi rakyat dalam menentukan arah pemerintahan dan nasib bangsanya. Dalam realitas sosial di Indonesia, pemilihan umum adalah momentum politik yang menyentuh disetiap elemen lapisan masyarakat. Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme politik sederhana, tetapi juga sebagai ruang terbuka bagi ekspresi identitas dan aspirasi masyarakat. Pemilu di Indonesia adalah cerminan dari kompleksitas sosial bangsa yang multikultural, tempat berbagai kepentingan, nilai, dan harapan bertemu dalam sebuah arena politik yang demokratis namun penuh ketegangan (Suryadi & Nelwati, 2024).

Di Indonesia sendiri, sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955 pasca kemerdekaan, Pemilihan Umum (Pemilu) telah menjadi pilar demokrasi. Hingga tahun 2024, Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu legislatif dan/atau presiden sebanyak 13 kali, dengan beberapa di antaranya merupakan pemilu serentak untuk memilih anggota legislatif dan presiden/wakil presiden sekaligus, mencerminkan dinamika panjang perjalanan demokrasi di Tanah Air (Nurfadilla & Nurdin, 2024).

Terkhusus dalam pemilu Presiden tahun 2014, bangsa Indonesia menyaksikan sebuah momen politik yang sangat dinamis dan reflektif. Debat dan kampanye para capres menunjukkan beragam dinamika politik yang menarik perhatian publik. Debat

tidak hanya menghadirkan pertarungan gagasan, tetapi juga janji-janji politik yang disampaikan para kandidat. Janji politik, dalam konteks ini, sering kali menjadi pedang bermata dua, di satu sisi mampu meyakinkan pemilih, tetapi di sisi lain berpotensi menjadi kekecewaan jika tidak direalisasikan (Khotimah & Kusuma, 2024).

Fenomena janji politik dalam kontestasi demokrasi merupakan realitas yang lazim namun penuh kompleksitas. Setiap kontestasi politik menghadirkan harapan baru, janji-janji yang dilontarkan oleh kandidat politik menjadi semacam kontrak sosial tidak tertulis antara pemimpin dan rakyatnya. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada lingkup Indonesia, tetapi terjadi secara global. Namun, di Indonesia, janji politik acapkali menjadi sorotan tajam karena dianggap tidak selalu terealisasi secara konsisten (Muhtadi, 2019)

Salah satu janji penting Jokowi adalah pembangunan dan penambahan kilang minyak Pertamina sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan energi nasional. Jokowi menekankan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM harus dikurangi, karena selama ini kapasitas kilang Pertamina yang terbatas tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Melalui *program Refinery Development Master Plan (RDMP)* dan *Grass Root Refinery (GRR)*, pemerintah menjanjikan pembangunan beberapa kilang baru sekaligus modernisasi kilang lama, dengan target peningkatan kapasitas produksi hingga 2 juta barel per hari. Janji ini tentu akan menjadi reformasi energi (<https://www.cnbcindonesia.com/news/duh-5-tahun-jokowi-bangun-kilang-berakhir-sebatas-janji>, diakses pada 23 Juni 2025)

Namun pada faktanya janji Jokowi terkait Pertamina masih seringkali terhambat dan banyak yang belum terealisasikan. Menjelang akhir periode pemerintahannya pada 2023-2024, capaian janji tersebut masih jauh dari harapan. Banyak proyek kilang baru belum memasuki tahap konstruksi, sementara beberapa lainnya masih jauh dari target produksi penuh. Hal ini menggambarkan bahwasannya adanya kesenjangan antara retorika dan realitas nyata dari janji-janji politik tersebut.

Salah satu janji politik lainnya yang paling mencolok sekaligus kontroversial adalah komitmennya untuk menjadikan Pertamina, perusahaan migas terbesar di Indonesia, menjadi lebih besar dan lebih maju dibanding Petronas milik Malaysia (<https://finance.detik.com/energi>, [janji-jokowi-jk-besarkan-pertamina-kalahkan-petronas](#), diakses pada 23 Juni 2025).

Dalam kampanyenya yang disaksikan jutaan rakyat Indonesia, Jokowi secara eksplisit menyatakan bahwa ia bertekad membawa PT. Pertamina untuk mampu melampaui Petronas, raksasa migas dari Malaysia. Namun melihat data dan fakta sebenarnya di tahun terakhir kepemimpinan Presiden Jokowi, mengutip dari sumber laman resmi Pertamina, mencatatkan pendapatan konsolidasi sebesar US\$84,89 miliar, dan berhasil membukukan laba bersih sebesar US\$4,77 miliar atau setara sekitar Rp72,7 triliun (<https://www2.pertamina.com/id/news-room>, diakses pada 23 Juni 2025).

Meskipun mengalami peningkatan, namun angka pencapaian ini jika dikomperasikan dengan Petronas yang mengutip dari laman resmi mereka *Petronas Annual Report FY2023*. Perusahaan migas nasional Malaysia, mencatatkan pendapatan sebesar RM343,6 miliar, yang jika dikonversi setara dengan US\$73,01 miliar atau Rp1.095 triliun. Dan dengan laba bersih sebesar US\$17,15 miliar, atau setara Rp1.236 triliun Laba Petronas masih jauh lebih besar dibandingkan laba bersih Pertamina, mencerminkan bahwa realitas janji Jokowi masih hanya sebatas retorika semata. (<https://www.petronas.com/sites>, diakses pada 23 Juni 2025).

Kegagalan realisasi janji ini bukan sekadar persoalan teknis atau operasional semata. Hal ini merefleksikan realitas politik Indonesia, di mana janji-janji kampanye sering kali hanya menjadi alat untuk meraih dukungan electoral. Kegagalan ini mengungkap realitas yang mendorong masyarakat untuk merefleksikan kembali bagaimana seharusnya janji politik dimaknai dalam demokrasi Indonesia. Janji politik tidak boleh lagi dipandang hanya sebagai pemanis atau strategi kampanye belaka, melainkan sebagai komitmen moral yang harus ditegakkan dengan sungguh-sungguh (Fahamsyah, 2022).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengangkat isu-isu terkait janji politik Jokowi secara umum maupun khusus dalam beberapa aspek. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh (Muhtadi, 2019) *Policy Review and Implementation of Jokowi's Government* menunjukkan bahwa janji politik Jokowi dalam bidang infrastruktur memiliki tingkat realisasi yang cukup tinggi, tetapi belum secara khusus mengulas sektor energi secara mendalam.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hasanah & Mardikantoro, 2017) yang berjudul *Konstruksi Realitas Seratus Hari Pertama Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla di Media Online : Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough*. Menyajikan menyajikan

analisis kritis tentang bagaimana janji kampanye dalam bidang ekonomi selama pemerintahan Jokowi sering kali terkendala oleh berbagai faktor institusional. Namun, penelitian tersebut belum mengulas secara mendalam aspek BUMN energi, khususnya Pertamina, yang memiliki nilai simbolis dan ekonomis tinggi.

Dari beberapa kajian terdahulu, terlihat adanya celah penelitian yang penting untuk diisi, terutama yang berkaitan dengan aspek mendalam tentang realisasi janji politik Jokowi pada sektor energi khususnya Pertamina. Sektor energi merupakan sektor yang vital sekaligus sensitif, dengan berbagai aspek sosial-politik dan ekonomi yang saling bertautan erat. Oleh karena itu, sangat relevan untuk mendalami bagaimana realisasi janji politik di sektor ini berjalan dalam kurun waktu sepuluh tahun selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi, dan bagaimana janji itu dapat dimaknai, apakah dalam bentuk sebuah retorika kampanye belaka atau sebuah realitas yang sulit untuk digapai.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena untuk menjawab tujuan penelitian yang menitikberatkan pada eksplorasi makna. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan bagaimana ketidakrealistisan janji politik serta bagaimana dapat ditemukan pemahaman mendalam mengenai bagaimana bentuk realisasi janji politik Jokowi yang bersifat simbolis sekaligus substansial.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Janji Politik Jokowi dan Realisasi 10 Tahun Kepemimpinannya (Studi Kasus PT. Pertamina Persero)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data primer diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah dan institusi terkait, seperti pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo, jejak-jejak digital kampanye, video debat capres, dokumen visi-misi dan janji politik baik dalam bentuk video maupun teks, dan laporan resmi PT. Pertamina Persero, termasuk laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*).

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil analisis, dan interpretasi terhadap data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan seperti buku-buku ilmiah, jurnal akademik, hasil penelitian sebelumnya, laporan media massa nasional, artikel opini para ahli kebijakan publik, serta publikasi dari lembaga terkait.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Penulis menggunakan metode analisis data Miles dan Huberman yang dilakukan dengan tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk Janji Politik Jokowi

Jokowi menjadikan sektor energi sebagai salah satu fokus utama dalam visinya. Hal ini lahir dari kesadaran bahwa Indonesia, meski kaya sumber daya alam, justru menghadapi ketergantungan yang tinggi terhadap impor minyak dan lemahnya kapasitas kilang domestik. Di tengah situasi itu, Jokowi mengkampanyekan sejumlah janji politik yang secara khusus diarahkan kepada Pertamina. Pertama, Jokowi berjanji mendorong pembangunan dan revitalisasi kilang minyak melalui program *Refinery Development Master Plan* (RDMP) dan *Grass Root Refinery* (GRR).

Kedua, ia berjanji menjadikan Pertamina sebagai operator utama blok migas nasional, terutama dengan mengambil alih pengelolaan blok-blok strategis yang kontraknya dengan asing habis. Janji ini merupakan simbol kedaulatan energi, di mana Pertamina tidak lagi sekadar mitra, melainkan pemimpin pengelolaan sumber daya migas.

Dan ketiga, janji politik Jokowi juga mencakup upaya menjadikan Pertamina kompetitif di tingkat internasional dengan mengatakan ingin membesarkan Pertamina agar dapat mengalahkan Petronas. Jokowi menegaskan bahwa Pertamina harus “dibesarkan” agar mampu bersaing dan menjadi simbol kemandirian ekonomi bangsa. Maka dari itu, beberapa janji politik ini dapat dianalisis melalui teori janji politik (*political promises*) dari Prof. Erin Naurin, dengan menggunakan indikator tingkat kekhususan janji sebagai alat untuk menilai tingkat spesifikasi janji Jokowi. Karena menurut Naurin jika semakin spesifik janji, maka akan semakin mudah untuk dinilai dan dievaluasi.

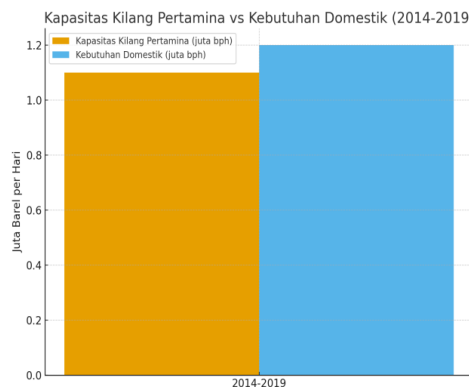
Analisis Tingkat Kekhususan Janji

Narasi kampanye janji politik Jokowi pada Pemilu 2014, ia menekankan pentingnya mewujudkan kedaulatan energi nasional. Dalam pidato kampanye maupun visi-misi yang dituangkan dalam dokumen Nawacita, Jokowi menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada impor energi, dan salah satu janjinya adalah mulai dari pembangunan serta modernisasi kilang minyak.

Hal ini dikonfirmasi oleh hasil pers Johan Budi seorang juru bicara Presiden tahun 2015 yang diterbitkan melalui media massa @antaranews.com, menjelaskan tentang adanya janji Politik tersebut.

“Pemerintah pusat merencanakan pembangunan kilang minyak baru dengan kapasitas 600 ribu barel, yang digadang menjadi kilang terbesar di Indonesia Sebagai wujud janji Pak Presiden kepada Pertamina. Program ini merupakan bagian dari agenda Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pembangunan kilang ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, memperkuat daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi melalui penguatan sektor-sektor strategis dalam perekonomian domestik.”(antaranews.com 2015).

Konteks munculnya janji tersebut erat kaitannya dengan realitas energi nasional, di mana kapasitas kilang Pertamina saat itu hanya berkisar 1,1 juta barel per hari, sementara kebutuhan domestik telah melampaui angka 1,2 juta barel per hari. Akibat keterbatasan ini, Indonesia terus bergantung pada impor BBM sehingga menciptakan defisit neraca migas dan melemahkan ketahanan energi nasional.



Gambar 1. Grafik Kapasitas Kilang Pertamina

Janji pembangunan kilang minyak baru yang dilontarkan Jokowi pada Pemilu 2014 dapat dilihat sebagai respons strategis atas tantangan nyata yang dihadapi Indonesia. Pembangunan kilang diposisikan sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi defisit energi, menekan impor, serta memperkuat fondasi kedaulatan energi nasional.

Dari perspektif Teori Janji Politik Naurin, janji ini termasuk ke dalam kategori *“highly specific pledge”*, sebab ia memenuhi unsur, apa yang akan dilakukan (pembangunan kilang), siapa yang bertanggung jawab (Pertamina sebagai BUMN strategis), berapa kapasitasnya (600 ribu barel per hari), serta mengapa hal itu penting (menekan defisit energi dan impor BBM). Konteks empiris yang memperlihatkan kesenjangan antara kapasitas kilang (1,1 juta barel per hari) dan kebutuhan domestik (lebih dari 1,2 juta barel per hari) semakin mempertegas tingkat kekhususan janji tersebut.

Adapun janji politik Jokowi yang lainnya ialah membuat Pertamina menjadi Operator Migas di Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Tim Sukses Jokowi-JK, Darmawan Prasodjo, dalam seminar solusi permasalahan energi nasional pada Kamis, tanggal 19 Juni 2014, yang dipublish oleh @liputan6.com.

“Perusahaan minyak Malaysia, Petronas, mampu berkembang pesat karena memperoleh kepercayaan penuh dari negaranya dalam mengelola sumber daya energi. Strategi migas Malaysia sejak awal diarahkan untuk membangun industri perminyakan nasional sekaligus memperkuat pemanfaatan potensi sumber daya dalam negeri. Sejalan dengan hal itu, calon presiden kami Pak Jokowi akan berkomitmen untuk mendorong kemajuan Pertamina sebagai perusahaan minyak nasional. Pertamina direncanakan akan diberi peluang lebih besar untuk mengelola blok-blok migas baru maupun blok yang kontraknya segera berakhir” (liputan6.com, 2014).

Jika Pertamina menjadi Operator Migas maka Pertamina lah yang menentukan cara pengeboran, teknologi apa yang dipakai, berapa biaya, dan bagaimana hasilnya akan dijual. Kemudian keuntungan lebih banyak masuk ke negara, bukan dibagi besar-besaran dengan asing.. Dampaknya, jika ini benar-benar dialankan maka Indonesia lebih mandiri secara energi dan tidak terlalu bergantung pada perusahaan asing (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2065629/jokowi-jk-janji-pertamina-jadi-operator-migas-di-indonesia>, diakses pada 27 September 2025, pada pukul 19.33).

Janji tersebut dapat digolongkan sebagai janji dengan tingkat kekhususan sedang (*semi specific pledge*). Disebut spesifik karena Jokowi menyatakan dengan jelas apa yang dijanjikan (Pertamina sebagai operator migas), siapa pelaksana kebijakan (Pertamina), dan bagaimana implementasinya (mengelola blok-blok baru dan blok yang kontraknya berakhir). Namun, janji ini tidak menyertakan target kuantitatif yang terukur (misalnya porsi produksi atau periode waktu pencapaian), sehingga tingkat kekhususannya masih lebih rendah dibanding janji membangun kilang minyak dengan kapasitas tertentu.

Adapun janji konkret Jokowi lainnya mengutip dari buku Mewujudkan Agenda Prioritas Nawacita (2015). Pasangan Jokowi-JK menargetkan Pertamina berkontribusi >50% pada produksi minyak nasional dalam 5 tahun. Janji ini lahir dari kesadaran bahwa pada saat itu porsi Pertamina sebagai operator migas domestik masih relatif kecil, hanya sekitar 21 persen, sementara lebih dari 70 persen pengelolaan migas Indonesia dikuasai oleh kontraktor asing.

Kemudian Janji ini di respon langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo sebagai Tim Pemenangan Nasional Jokowi-JK dengan optimisme yang kuat. Dalam wawancaranya bersama media *@kompas.com* pada tanggal 23 Mei 2014 ia mengatakan.

“Ketika Pak Jokowi dan Pak JK menyampaikan target Pertamina harus menguasai lebih dari 50% produksi minyak nasional dalam lima tahun, itu bukan sekadar janji teknis, tetapi visi besar untuk kedaulatan energi Indonesia. Kami percaya, bangsa yang besar harus bisa mengelola sumber daya alamnya sendiri. Pertamina tidak boleh lagi hanya menjadi penonton, sementara kontraktor asing yang menikmati hasilnya. Saat itu kami optimis, jika Petronas di Malaysia bisa menguasai 60%, mengapa Pertamina tidak bisa?”
(kompas.com, 2014).

Pada dasarnya, janji tersebut bukan hanya soal meningkatkan produksi minyak mentah, tetapi juga tentang memperbesar kendali negara lewat Pertamina atas aset migas penting yang sebelumnya banyak dikelola perusahaan asing. Karena itu, target “lebih dari 50 persen” menuntut adanya perubahan besar dalam pengelolaan migas nasional, misalnya dengan menyerahkan lapangan-lapangan besar yang kontraknya sudah habis kepada Pertamina, serta mendorong aktivitas eksplorasi dan produksi yang lebih luas.

Dalam teori tipologi Naurin, janji ini termasuk kategori *highly specific pledge*, karena mengandung unsur yang terukur dan jelas. Target “lebih dari 50%” menyajikan indikator kuantitatif yang dapat dengan mudah dievaluasi publik di kemudian hari. Spesifikasi janji tidak hanya menyebut tujuan abstrak (kedaulatan energi), tetapi juga memberikan angka capaian konkret, aktor pelaksana (Pertamina), serta mekanisme pencapaiannya (pengambilalihan lapangan migas habis kontrak, peningkatan eksplorasi, dan ekspansi produksi). Tingkat kekhususan yang tinggi ini meningkatkan kredibilitas sekaligus risiko politik, sebab keberhasilan maupun kegagalannya akan terlihat nyata dalam data produksi migas nasional.

Dalam kampanye masifnya terdapat satu janji kontroversial Jokowi yang mengatakan ingin membesarkan Pertamina mengalahkan Petronas. Secara tegas Ia menyinggung bahwa Pertamina harus dibesarkan agar bisa bersaing dengan Petronas dan tumbuh besar dipasar global, hal ini bukan tanpa dasar, peroide tersebut Pertamina memang sedang mengalami penurunan laba, maka dari itu kesempatan tersebut dimanfaatkan sebagai alat kampanye politik guna untuk menarik atensi (<https://finance.detik.com/energi/d-2627515/janji-jokowi-jk-besarkan-pertamina-kalahkan-petronas>, diakses pada 27 September 2025 pada pukul 20.11).

“Kuncinya ada pada political will. Kalau pemerintah punya kemauan kuat, Pertamina bisa lebih besar dari Petronas. Petronas besar karena negaranya percaya pada mereka. Kami juga percaya, jika Pertamina diberi ruang yang lebih besar diberi dukungan penuh, mereka bisa membuktikan diri. Ini bukan sekadar soal bisnis, ini soal kedaulatan energi”
(detikfinance.com 2014)

Pernyataan Jokowi dalam pers tersebut menjadi sorotan karena bersifat simbolik dan emosional, mengingat secara data dan fakta yang ada, Petronas selama ini lebih maju dalam skala internasional dibanding Pertamina, Terutama dalam hal infrastruktur, branding, dan portofolio bisnis. Dari sisi skala bisnis, pendapatan Pertamina relatif mendekati Petronas, tetapi profitabilitasnya jauh tertinggal. Fakta inilah yang menjadikan janji Jokowi terasa ambisius sekaligus problematis.

Dari data tersebut dapat dianalisis bahwa janji ini lebih bersifat retorik dan simbolik. Janji ini masuk kategori janji abstrak menurut Naurin karena tidak disertai target kuantitatif maupun tenggat waktu yang jelas. Janji semacam ini lebih berfungsi sebagai alat mobilisasi politik yang membangkitkan kebanggaan nasional dan membangun sentimen emosional publik, daripada sebagai janji kebijakan teknis konkret yang dapat diverifikasi.

Dari keseluruhan janji-janji politik Jokowi tersebut maka dapat dianalisis bahwa terdapat beberapa janji yang bersifat spesifik (*highly specific pledge*), semi spesifik (*semi-specific pledge*), hingga hanya bersifat retorik semata (*vague pledge*). Sebagai bentuk gambaran semua tingkat kekhususan janji akan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Kategori Tingkat Kekhususan

No.	Janji	Kategori Tingkat Kekhususan
1	Pembangunan kilang minyak kapasitas 600 ribu barel per hari	Spesifik (<i>highly specific pledge</i>)
2	Pertamina menjadi operator migas utama	Semi-spesifik (<i>semi-specific pledge</i>)

3	Membuat Pertamina lebih besar dari Petronas	Abstrak/Retoris (<i>vague pledge</i>)
---	---	---

Semua janji tersebut jika ditinjau dalam indikator teori tingkat kekhususan janji Naurin maka dapat dijelaskan sebagaimana *highly specific pledge* atau janji yang sangat spesifik merupakan jenis janji yang dicirikan oleh adanya indikator kuantitatif atau kualitatif yang jelas, seperti angka, target, objek kebijakan, lokasi, atau kerangka waktu tertentu. Janji semacam ini mudah diverifikasi karena publik dapat mengukur apakah target tersebut benar-benar tercapai. Dalam perspektif politik, janji yang sangat spesifik meningkatkan akuntabilitas kandidat, tetapi sekaligus membawa risiko besar kegagalan dalam merealisasikannya akan menimbulkan kritik dan dapat meruntuhkan legitimasi politik.

Semi-specific pledge atau janji setengah spesifik. Janji ini biasanya berisi arah kebijakan yang relatif jelas, tetapi tidak menyebut angka atau tenggat waktu tertentu. Misalnya, janji Jokowi untuk menjadikan Pertamina sebagai operator utama migas di Indonesia. Pernyataan ini memberi arah kebijakan yang konkret, tetapi masih menyisakan ruang abu-abu dalam evaluasi. Realisasinya bisa diklaim berhasil sejauh Pertamina memperoleh alokasi blok migas baru, meskipun besarnya penguasaan atau batas waktu pencapaiannya tidak pernah disebutkan.

Vague or abstract pledge, yaitu janji yang bersifat retorik dan simbolik. Janji semacam ini biasanya berbentuk visi besar atau nilai normatif, tanpa indikator capaian yang jelas. Janji ini sangat lemah karena tidak ada parameter pasti untuk menilai keberhasilannya. Apakah mengalahkan Petronas berarti dari sisi laba, pendapatan, aset, atau posisi di pasar global, semuanya tidak pernah dijelaskan secara spesifik.

Signaling

Didalam buku *Election Promises, Party Behaviour and Voter Perceptions*, Erin Naurin menjelaskan janji politik perlu dianalisis tidak hanya sebagai retorika semata, melainkan sebagai sebuah fungsi politik yang memiliki peran penting dalam dinamika demokrasi. Analisis terhadap fungsi janji politik memberikan pemahaman bahwa janji bukanlah sekadar kata-kata untuk meraih simpati, tetapi merupakan instrumen strategis yang memengaruhi proses komunikasi politik antara kandidat dan pemilih. Melalui janji, kandidat mengirimkan sinyal tentang arah kebijakan yang akan diambil, membedakan dirinya dari lawan politik, dan memobilisasi dukungan masyarakat.

Dalam indikator teori *signaling* salah satu fungsi utama dari janji politik adalah sebagai *signaling* atau pemberi sinyal kebijakan. Fungsi ini merujuk pada peran janji politik dalam mengkomunikasikan arah kebijakan dan prioritas program kandidat kepada publik.

Pada tahun 2014, posisi Pertamina dalam produksi minyak nasional masih relatif kecil. Dari total produksi minyak Indonesia yang berkisar 794 ribu barel per hari, Pertamina hanya mampu menghasilkan sekitar 170 ribu barel per hari, atau setara 21 persen. Sementara itu, lebih dari 70 persen produksi masih dikuasai oleh kontraktor asing seperti Chevron, Total, ExxonMobil, dan perusahaan migas internasional lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya ketergantungan besar terhadap pihak asing dalam mengelola sumber daya minyak Indonesia (Laporan SKK Migas 2014, Kementerian ESDM, diakses pada 28 September 2025, pukul 08.24 WIB).

Realitas tersebut menjadi latar belakang mengapa janji politik Jokowi-JK untuk memperkuat Pertamina muncul ke permukaan. Janji agar Pertamina dapat menguasai lebih dari 50 persen produksi minyak nasional dalam lima tahun bukanlah sekadar angka, melainkan sinyal kebijakan untuk mengurangi dominasi asing dan mengembalikan kendali negara atas sektor energi strategis. Dengan menempatkan Pertamina sebagai motor utama kedaulatan energi, Jokowi berusaha mengirimkan pesan kepada publik bahwa pemerintahannya memiliki komitmen kuat terhadap penguatan BUMN dan kemandirian energi nasional.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Goenawan Mohamad sebagai seorang seniman kondang yang pada masa itu sangat vokal dalam mendukung dan ikut tergabung dalam timses Pemenangan Jokowi-JK ditahun 2014. Didalam media yang dipublish oleh @metronesws.com pada tanggal 02 Juni 2014, ia mengatakan :

“Kita sadar, pada 2014 posisi Pertamina masih lemah, hanya sekitar 21 persen. Tapi justru di situlah letak pentingnya janji ini: kami ingin publik melihat bahwa Jokowi tidak takut membuat komitmen yang besar demi kepentingan bangsa. Dengan begitu, masyarakat tahu arah pemerintahan ke depan akan memberi prioritas pada BUMN, bukan lagi pada dominasi perusahaan asing”.
(metronews.co.id 2014).

Secara keseluruhan janji ini dalam indikator teori *signaling* menuai sinyal kebijakan yang sarat makna politik. Dalam konteks ini, janji Jokowi-JK mengirimkan pesan politik yang jelas tentang prioritas pemerintahan. Pesan tersebut akan membuat

pemilih mampu membaca arah kebijakan dan menilai orientasi kepemimpinan yang ditawarkan.

Janji ini juga berorientasi pada penguatan peran BUMN strategis, mengurangi dominasi asing, serta memberikan harapan baru tentang kemandirian energi nasional. Dengan demikian, fungsi signaling dari janji ini tampak jelas ia bekerja sebagai sarana komunikasi politik yang menyampaikan prioritas kebijakan, membangun citra keberanian, dan menggerakkan optimisme masyarakat terhadap arah kepemimpinan baru.

Differenitiation

Pada indikator teori *defferenitiation* atau pembeda diartikan sebagai alat strategis yang memungkinkan kandidat membedakan dirinya dari kompetitor. Fungsi pembeda ini krusial karena dalam arena pemilu, isu, program, dan slogan kerap terdengar serupa. Melalui janji yang dirancang secara spesifik dan mudah diingat, kandidat dapat memosisikan diri sebagai representasi dari agenda tertentu yang tidak diusung oleh lawannya.

Differentiation, menurut Naurin, merupakan dimensi penting dalam komunikasi politik yang menekankan “*distinctive positioning*,” yakni upaya kandidat membangun batas yang jelas antara dirinya dengan kompetitor. Janji politik berperan sebagai medium artikulasi perbedaan tersebut, sehingga publik tidak hanya menilai isi program, tetapi juga karakter kepemimpinan yang ditawarkan.

Dalam janji-janji politik Jokowi, fungsi *differentiation* mendapatkan relevansinya mengingat kompetisi elektoral sering kali berlangsung dalam kerangka isu yang beragam, seperti kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, dan kedaulatan energi. Pada Pilpres 2014, janji politik Jokowi terkait Pertamina menjadi instrumen penting dalam membangun perbedaan dengan pesaing utamanya, Prabowo Subianto.

Prabowo-Hatta ditahun 2014 memiliki pandangan berbeda dalam melihat masa depan sektor energi Indonesia. Jika Jokowi secara eksplisit menggunakan BUMN Pertamina sebagai landasan utama energi, maka paslon ini berfokus pada membuat ekosistem energy yang efisien. Hal ini diungkapkan oleh akun di X (Twitter) dengan nama @barakhasibuan yang memiliki nama asli Bara Krishna Hasibuan, ia merupakan seorang juru bicara kampanye Prabowo Hatta di tahun 2014 :

“Pertamina bagi kami tetap menjadi tulang punggung energi nasional, tetapi

pendekatan Prabowo-Hatta berbeda dengan paslon sebelah. Kalau mereka menekankan angka kuantitatif seperti penguasaan produksi, kami lebih melihat Pertamina sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem energi nasional yang lebih luas. Fokus kami adalah membuat ekosistem energi yang efisien, mandiri, dan adil. Pertamina tentu akan diperkuat, tapi bukan satu-satunya jalan”. (akun X @barakhasibuan, diupload pada 13 Februari 2014).

Jika melihat hasil dari data diatas, maka dapat dianalisis bahwa Jokowi memframing isu energi dengan menekankan aspek kedaulatan dan kapasitas nasional melalui BUMN, sedangkan Prabowo mengemas isu yang sama dengan sudut pandang efisiensi dan tata kelola yang lebih rasional. Kedua narasi ini sama-sama berangkat dari problematika energi nasional, tetapi arah komunikasinya berbeda.

Jokowi menggunakan logika keberpihakan dan simbol kedaulatan, sementara Prabowo mengedepankan rasionalisasi sistem. Dari sinilah terlihat bahwa fungsi pembeda dalam janji politik tidak hanya berada pada konten kebijakan, melainkan juga pada gaya komunikasi politik yang digunakan untuk menyentuh preferensi pemilih. Perbedaan Visi & Misi kedua paslon dapat digambarkan melalui tabel dibawah ini.

Tabel 1. Perbedaan Visi Jokowi dan Prabowo di Sektor Energi

Aspek	Jokowi – JK	Prabowo – Hatta
Fokus Utama	Pertamina sebagai simbol kedaulatan energi	Energi dalam kerangka ketahanan nasional (energi, pangan, air)
Strategi	Memperkuat peran BUMN energi (state-oriented)	Diversifikasi dan efisiensi energi
Janji Kuantitatif	Pertamina kuasai >50% produksi minyak nasional, bangun kilang baru, bersaing dengan Petronas	Tidak ada target angka spesifik, lebih menekankan swasembada energi
Pendekatan Politik	Narasi BUMN sebagai instrumen kedaulatan negara	Narasi nasionalisme ekonomi & swasembada energi yang lebih luas
Kebijakan Kunci	Pengalihan blok migas habis kontrak ke Pertamina, hilirisasi energi, pembangunan kilang	Pengurangan impor BBM, energi terbarukan, insentif diversifikasi energi

Sumber : *Nawacita & Program Aksi Transformasi Bangsa*

Sebagian janji Jokowi masuk kedalam kategorisasi indikator *diferenitation*. Janji-janji Jokowi maupun Prabowo tidak hanya bersaing dalam tataran substansi kebijakan, tetapi juga dalam dimensi simbolik yang berusaha menciptakan identitas politik berbeda. Bagi Jokowi, identitas tersebut terikat pada upaya membesarkan Pertamina sebagai simbol kedaulatan energi nasional. Bagi Prabowo, identitasnya dikaitkan dengan visi membangun sistem energi yang adil, efisien, dan mandiri tanpa terlalu

bergantung pada satu institusi saja. Perbedaan titik tekan inilah yang memperlihatkan fungsi strategis janji politik sebagai sarana positioning dalam arena demokrasi elektoral Indonesia.

Bentuk Realisasi Janji Jokowi

Robert Thomson melalui teorinya tentang *political promises* menekankan bahwa kegagalan pemenuhan janji politik sering kali tidak hanya disebabkan oleh faktor personal pemimpin, tetapi juga oleh kondisi struktural yang disebut sebagai *constraining dissensus*. Konsep ini merujuk pada adanya keterbatasan dalam menepati janji karena politisi harus menghadapi dinamika kompromi politik, tarik-menarik kepentingan koalisi, serta struktur pemerintahan yang membatasi ruang gerak kebijakan.

Janji politik sering berubah setelah pemilu karena berbenturan dengan kenyataan di pemerintahan. Saat mulai bekerja, janji yang dulu tegas harus dinegosiasikan dengan pihak-pihak yang punya “hak veto” (mitra koalisi, DPR/komisi, kementerian), menyesuaikan aturan yang berlaku (UU, anggaran, tata kelola BUMN), serta menghadapi keterbatasan dana dan faktor luar (harga minyak dunia, krisis). penelitian ini akan menunjukkan bagaimana janji-janji Jokowi terkait Pertamina “bergerak” dari formulasi kampanye menuju desain implementasi apakah ditepati secara penuh, disesuaikan secara bertahap, atau dialihkan melalui kebijakan yang lain.

Realisasi Janji Pembangunan Kilang Minyak

Pada masa kampanye Pilpres 2014, Presiden Jokowi mengumandangkan janji ambisius untuk membangun kilang minyak baru sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor BBM. Janji ini kemudian diterjemahkan ke dalam program besar *Refinery Development Master Plan* (RDMP) untuk modernisasi dan peningkatan kapasitas kilang eksisting, serta *Grass-Root Refinery* (GRR) untuk pembangunan kilang baru dari nol.

Effendi Simbolon, yang juga merupakan bagian tim pemenangan Jokowi-JK menyebut rencana minimal dua kilang baru berkapasitas 300-500 ribu bph untuk dikebut. Tak lama kemudian, pada 7 April 2015 Jokowi menyatakan pemerintah akan membangun kilang 600 ribu bph digadang sebagai terbesar di Indonesia dengan Bontang (Kalimantan Timur) sebagai lokasi yang diprioritaskan karena infrastruktur energi dan kesiapan lahan/ekosistem industri migas setempat. Janji ini sekaligus menjawab “kemandekan 30 tahun” pembangunan kilang baru yang kerap dikritik

(<https://finance.detik.com/energi/d-2676861/jokowi-akan-bangun-kilang-minyak-di-bontang-dan-indonesia-timur>, diakses pada 28 September 2025, pada pukul 22.16).

Jokowi dalam pidatonya yang dipublis di video youtube @METRO TV pada tanggal 28 Agustus 2014, mengutarakan uraian programnya untuk membangun GRR (*Grass-Root Refinery*) dan RDMP (*Refinery Development Master Plan*) untuk jangka panjang kedepan. Dalam video pidato tersebut ia mengatakan :

“Pemerintah akan menjalankan dua jalur besar pembangunan kilang GRR membangun kilang baru dari nol, dan RDMP memperkuat, memperluas, dan memodernisasi kilang yang sudah ada. Kenapa dua jalur? Karena kita butuh hasil cepat sekaligus lompatan jangka panjang. Proyek GRR berada di dua lokasi yaitu Tuban dan Bontang. Sedangkan RDMP berada di lima lokasi yaitu Cilacap, Plaju, Dumai, Balikpapan, dan Balongan. Pembangunan RDMP memberi percepatan menambah kapasitas, menaikkan mutu produk ke standar dunia, dengan memodernisasi unit-unit yang sudah berjalan. Sementara GRR adalah arsitektur masa depan. Saya sering sampaikan bahwa hilirisasi itu bukan jargon semata, di migas hilirisasi akan dimulai dengan produk BBM yang lebih bersih dan bermutu agar emisi turun dan kesehatan publik terjaga”. (Video kanal youtube @METRO TV, 28 Agustus 2014).

Atas pidatonya tersebut Jokowi berupaya mengungkapkan komitmennya untuk mencoba merealisasikan janji-janjinya selama kampanye untuk membangun beberapa kilang minyak di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu janji tersebut justru dapat dikatakan mandek. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi VII DPR RI 2023 dari Fraksi PKS, Mulyanto. Didalam rapat komisi pada tanggal 18 September 2023 yang di post melalui @fraksi.pks.id ia mengatakan :

“Pemerintah perlu menepati jadwal pelaksanaan pembangunan kilang baru serta peningkatan kapasitas kilang di berbagai daerah. Kami menekankan agar program yang sudah dirancang dan disetujui itu benar-benar berjalan sesuai rencana, Jangan sampai program yang sudah bagus dan disetujui itu oleh persoalan teknis yang sebenarnya bisa diatasi, apalagi progresnya terasa lamban. Saya menilai ada faktor nonteknis yang menjadi penyebab belum terealisasinya pembangunan RDMP Balikpapan”. (fraksi.pks.id, 2023).

Mulyanto dengan tegas mengkritik terhambatnya beberapa realisasi pembangunan kilang minyak yang ia duga karena adanya faktor non teknis. Hal ini mengindikasikan sejauh tahun 2023 selama kepemimpinan Jokowi banyak pembangunan kilang minyak seringkali berjalan tidak sesuai rencana.

Pada faktanya memang realisasi pembangunan kilang minyak ini sejauh 10 tahun kepemimpinan Jokowi banyak yang belum rampung 100%. Sebagaimana keterangan yang dipublikasi oleh mediamassa independen @duniaenergi.com pada tahun 2024

yang memaparkan tingkat presentase beberapa pembangunan kilang minyak di Indonesia yang telah dijanjikan oleh Jokowi di tahun 2014 lalu digambarkan didalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. Presentase Progress Pembangunan Kilang Minyak

Proyek	Perkiraan progres (%)	Alasan keterlambatan
RDMP Balikpapan	91–91,6% (Ags–Des 2024)	Insiden kebakaran Mei 2024 menunda pekerjaan tertentu isu biaya & logistik proyek besar.
GRR Tuban	<10% (pra konstruksi/early works)	perizinan & akuisisi lahan
GRR Bontang	0%	Kerja sama investor kandas; ketersediaan lahan tidak mencukupi proyek dihentikan 2020–2021.

Akibatnya dari target untuk mencapai kapasitas sebanyak 600 ribu barel perhari, di tahun 2024 Pertamina hanya bisa memproduksi sekitar 556 ribu barel per hari. Hal ini mengindikasi target janji jokowi tidak sepenuhnya terealisasi. (<https://www.petromindo.com/news/article/phe-posts-2024-production-figures-strengthens-energy-initiatives-2024> diakses pada 28 September 2025).

Berdasarkan data diatas maka, sesuai dengan konsep *constraining dissensus*, teori ini menekankan bahwa janji politik setelah pemilu sering tidak bisa dipenuhi secara utuh karena adanya hambatan politik, institusional, dan struktural. Apa yang dialami Jokowi menunjukkan hal tersebut dengan jelas. Sejak awal, Jokowi menargetkan pembangunan dua kilang baru dan revitalisasi kilang lama sebagai wujud kedaulatan energi. Namun dalam implementasinya, janji itu justru banyak yang tertunda, bahkan ada yang tidak terlaksana sama sekali.

RDMP Balikpapan relatif berhasil meski terhambat insiden teknis, sedangkan GRR Tuban hanya sampai tahap awal, dan GRR Bontang berhenti total. Ini menunjukkan adanya reduksi atau perubahan janji dari ambisi awal menjadi capaian parsial. Bahkan di tahun 2024 pun Pertamina hanya memproduksi kapasitas sekitar 556 ribu barel per hari, dan tidak sesuai dengan janji Jokowi yang mengatakan ingin meningkatkan kapasitas minyak nasional sebanyak lebih dari 600 ribu barel perhari.

Kondisi ini muncul karena berbagai faktor yang sesuai dengan ciri *onstraining dissensus*. Dari sisi politik, pembangunan kilang harus melibatkan banyak aktor dengan kepentingan berbeda, seperti DPR, kementerian, dan Pertamina. Dari sisi institusi,

regulasi dan birokrasi yang rumit membuat proyek memakan waktu panjang, dan dari sisi ekonomi, adanya keterbatasan dana dan mundurnya para investor.

Pertamina Menjadi Operator Migas Utama

Pada masa kampanye 2014, Jokowi berjanji memperkuat kedaulatan energi dengan cara memperbesar peran Pertamina sebagai operator langsung lapangan minyak dan gas di dalam negeri. Janji ini berarti ketika ada blok migas strategis, Pertamina diupayakan bukan hanya jadi mitra, tetapi menjadi pihak yang memimpin operasi dari pengeboran, produksi, sampai perawatan fasilitas.

Setelah Jokowi terpilih, arah kebijakan energi nasional diarahkan untuk memberi porsi yang lebih besar kepada Pertamina, terutama melalui pengalihan blok-blok migas yang kontraknya habis masa berlaku. Beberapa langkah nyata pun mulai terlihat. Misalnya, pengambilalihan Blok Mahakam dari Total E&P pada tahun 2018. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Direktur Hulu Pertamina, Syamsu Alama, didalam website Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di tahun 2018, ia mengatakan :

“Wilayah Kerja (WK) Mahakam di Kalimantan Timur sebelumnya dikelola oleh Total E&P Indonesia (TEPI) bersama Inpex selama kurang lebih lima dekade. Namun, sejak 1 Januari 2018, pengelolaan blok ini resmi beralih ke Pertamina Hulu Mahakam, yang merupakan anak usaha Pertamina. Bagi Pertamina, penugasan pengelolaan WK Mahakam dipandang sebagai amanat negara yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan peran dan fungsi Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara.” (esdm.co.id, 2018).

Atas usaha itu maka berdampak dari pengelolaan WK Mahakam oleh Pertamina, menjadikan Pertamina sebagai penyumbang lebih dari 30% produksi minyak dan gas nasional pada tahun 2018. Blok Mahakam yang merupakan salah satu ladang migas terbesar di Indonesia yang terletak di lepas pantai Kalimantan Timur, kini menjadi salah satu tulang punggung sektor energi Indonesia yang menopang pertumbuhan produksi minyak secara signifikan.

Alih kelola Mahakam menjadi simbol keberanian politik karena pemerintah untuk pertama kalinya menolak memperpanjang kontrak perusahaan asing yang sudah puluhan tahun bercokol di Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa Pertamina harus diberi kesempatan mengelola blok strategis, meski menghadapi keraguan banyak pihak mengenai kesiapan teknologi dan kemampuan finansialnya

Kemudian realisasi ini dilanjutkan dengan Blok Rokan dari Chevron pada tahun 2021. Blok Rokan terletak di Provinsi Riau dan dikenal sebagai salah satu blok migas

paling produktif di Indonesia. Blok ini sudah dieksploitasi sejak tahun 1951 oleh Chevron Pacific Indonesia (CPI). Selama puluhan tahun, Rokan menjadi andalan produksi minyak Indonesia dengan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Pada puncaknya, produksi Blok Rokan bisa mencapai lebih dari 1 juta barel per hari pada era 1970–1980an. Namun seiring waktu, produksi menurun karena ladang minyaknya memasuki fase tua(<https://www.cnbcindonesia.com/news/20250610133737-4-639724/pertamina-berupaya-mengulang-masa-kejayaan-blok-rokan-ini-caranya>, diakses pada 29 September 2025, pukul 19.04)

Sejalan dengan visi Jokowi memperkuat peran Pertamina, pemerintah akhirnya memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Chevron di Blok Rokan. Pada 9 Agustus 2021, pengelolaan resmi beralih ke PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), anak usaha Pertamina. Proses serah terima ini dianggap sebagai momen bersejarah, karena Rokan merupakan blok minyak terbesar kedua setelah Mahakam yang kembali dikelola oleh Pertamina. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri ESDM tahun 2021 Arifin Tasrif didalam website Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral , ia mengatakan :

“Hari ini merupakan salah satu tonggak sejarah industri hulu migas Indonesia, karena setelah PT Chevron Pacific Indonesia mengelola WK Rokan selama 80 tahun, maka pengelolaan salah satu WK terbesar di Indonesia ini selanjutnya diserahkan kepada BUMN, PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Hulu Rokan. pengelolaan WK Rokan oleh Pertamina menjelang hari Kemerdekaan Republik Indonesia, merupakan kebanggaan bagi Pertamina dan bangsa Indonesia serta wujud dukungan dari segenap bangsa Indonesia sehingga alih kelola berjalan dengan baik”. (esdm.co.id, 2021).

Hasil dari data tersebut menjadi indikator memang ada upaya dari pemerintahan Jokowi untuk berkomitmen menjadikan Pertamina sebagai operator migas utama. Dengan upaya pengelolaan blok-blok migas yang kontraknya habis masa berlaku, merupakan suatu inisiasi positif dalam mencapai kedaulatan energi.

Namun, realisasi janji ini tidak berjalan mulus. Pertamina menghadapi tantangan besar, mulai dari keterbatasan teknologi, pendanaan yang sangat besar untuk kegiatan eksplorasi dan produksi. Bahkan menurut data dari @energyworld.co.id, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) temukan kerugian proyek Rp3,3 Triliun di pipa blok Rokan (<https://energyworld.co.id/bpkp-temukan-kerugian-proyek-rp33-triliun-di-pipa-blok-rokan-pertagas> diakses pada tanggal 29 September 2025, pukul 20.41).

Selain itu pada faktanya kontribusi terhadap produksi nasional masih harus dibagi dengan operator swasta dan asing. Salah satu faktor utama yang membuat produksi migas Indonesia tetap terbagi adalah warisan kontrak jangka panjang yang ditandatangani puluhan tahun lalu. Sejak masa Orde Baru, pemerintah mengundang perusahaan-perusahaan global untuk masuk dan mengelola blok-blok besar, dengan perjanjian yang memberikan kepastian hukum hingga beberapa dekade.

Hal ini juga diungkap oleh direktur Pertamina pada tahun 2024 Simon Aloysius Mantiri ia mengungkapkan kenapa Pertamina belum bisa menjadi operator migas utama didalam sebuah pers yang ditebitkan oleh media massa @cncbIndonesia ditahun 2024, ia mengatakan :

“Masih banyak kontrak aktif yang tidak bisa serta-merta dibatalkan atau dialihkan ke Pertamina. Blok Tangguh yang tetap dikelola oleh BP dan Blok Masela yang menjadi proyek utama Inpex adalah contoh konkret bagaimana warisan kontrak membatasi ruang gerak pemerintah sekalipun ada kemauan politik yang kuat untuk memperbesar peran BUMN. Strategi berbagi produksi dengan asing juga mencerminkan pendekatan diversifikasi risiko. Pemerintah memilih jalan tengah memberi Pertamina kesempatan mengambil alih blok-blok yang kontraknya habis, sembari tetap mempertahankan investor asing pada lapangan-lapangan berteknologi tinggi. Dengan begitu, risiko teknis, keuangan, maupun manajerial dapat dibagi.”. (cncbindonesia, 2024).

Dari hasil pernyataan Simon Aloysius terungkap bahwa janji politik Jokowi masih belum sepenuhnya terpenuhi. Pertamina memang semakin kuat perannya tetapi belum berhasil menjadi pengendali tunggal produksi nasional.

Dari pemaparan data diatas maka dapat dianalisis sebagaimana Thomson menegaskan bahwa pasca pemilu, janji politik kerap mengalami reduksi atau modifikasi akibat tarik menarik kepentingan koalisi, serta faktor eksternal yang membatasi ruang gerak kebijakan. Dalam kasus janji dapat dikatakan janji tidak terealisasi sepenuhnya, Karena terdapat beberapa kendala yaitu, pertama, warisan kontrak jangka panjang dengan perusahaan asing yang ditandatangani sejak era Orde Baru tidak bisa serta-merta diputus. Kedua, keterbatasan kapasitas internal Pertamina, baik dari sisi teknologi eksplorasi laut dalam maupun pendanaan, membuat pemerintah tidak mungkin menyerahkan seluruh operasi migas hanya kepada BUMN.

Besarkan Pertamina Kalahkan Petronas

Salah satu janji Jokowi yang kontroversial pada masa kampanye 2014, Jokowi pernah berjanji memperkuat Pertamina dan menjadikannya lebih besar dari Petronas. Secara tingkat kekhususan, janji ini sangat umum dan bersifat abstrak serta retorik.

Artinya janji ini tidak memiliki target indikator kuantitas yang pasti, sehingga hanya dapat dipahami sebagai fungsi retorika kampanye untuk menarik simpati masyarakat. Mengingat kuatnya Petronas di sektor energi dan migas didalam bentuk portofolio bisnis maupun infrastruktur global, maka peneliti akan membandingkan pendapatan dan bersih laba kedua perusahaan di tahun 2019-2024 sebagai cerminanan realisasi janji.

Upaya realisasi janji ini perlu melakukan beberapa langkah kebijakan strategis. Namun untuk melihat sejauh mana realisasi janji tersebut dapat dilihat dari hasil perbandingan pendapatan dan laba bersih di periode kedua kepemimpinan rezim Jokowi.

Tabel 3. Perbandingan Pendapatan Pertamina & Petronas 2019/2024

Tahun	Pertamina Pendapatan	Pertamina Laba Bersih	Petronas Pendapatan	Petronas Laba Bersih
2019	772,4 T	35,8 T	826,6 T	139,3 T
2020	605,2 T	15,3 T	629,9 T	170,9 T
2021	822,7 T	29,3 T	861,8 T	168,9 T
2022	1.260,7 T	56,4 T	1.313,6 T	355,6 T
2023	1.157,1 T	67,2 T	1.219,8 T	286,5 T
2024	975,0 T	48,9 T	1.152,0 T	198,4 T
TOTAL	5.593,1	252,9 T	5.999,7 T	1.074,7 T

Sumber : *Pertamina & Petronas Annual Report*

Tabel perbandingan kinerja keuangan antara Pertamina dan Petronas pada periode 2019-2024 memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup jauh baik dalam pendapatan maupun laba bersih. Total pendapatan Pertamina selama periode tersebut mencapai sekitar Rp 5.593 triliun dengan laba bersih sebesar Rp 252,9 triliun, sementara Petronas membukukan pendapatan lebih besar, yakni Rp 5.999,7 triliun dan laba bersih jauh lebih tinggi, yaitu Rp 1.074,7 triliun. Melihat perbandingan data tersebut maka dapat dikatakan janji ini sangat sulit untuk direalisasikan secara nyata dan terlalu bersifat abstrak, sehingga sulit untuk mengimplementasikannya kedalam bentuk kebijakan karena tidak adanya indikator-indikator yang konkret untuk mencapai itu. (*Pertamina & Petronas Annual Report*)

Letjen (Purn) Suryo Prabowo, mengkritik langkah Pertamina yang melepas sejumlah aset hilir seperti stasiun pengisian bahan bakar (SPBU), terminal BBM kecil, dan properti lain. Aset tersebut dijual kepada mitra swasta. Penjualan aset dianggap bertolak belakang dengan janji kedaulatan energi. Masyarakat menilai, seharusnya

pemerintah menambah modal langsung ke Pertamina, bukan membiarkan perusahaan menjual aset vital.

Hal ini tidak terlepas dari kasus Korupsi yang menyeret mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan. Pengadilan korupsi di Jakarta pada 2024 memvonis Karen bersalah atas perjanjian pembelian LNG jangka panjang yang dinilai menimbulkan kerugian negara. Nilai kerugian yang diajukan penyidik mencapai sekitar Rp 2,1 triliun. dan pada proses banding serta kasasi hukuman diperberat putusan pengadilan dan peningkatan hukuman Mahkamah Agung (<https://news.detik.com/berita/d-7188853/karen-agustiawan-didakwa-rugikan-negara-usd-113-juta-di-kasus-korupsi-lng>. Diakses pada 30 September 2025, pada pukul 14.17).

Faktor kompromi politik dalam koalisi juga mempersempit ruang realisasi janji ini. Pemerintahan Jokowi sejak periode pertama bergantung pada koalisi multipartai yang heterogen, di mana setiap partai memiliki agenda dan kepentingan berbeda. Menurut hasil wawancara dengan pengamat energi Fabby Tumiwa (Direktur Eksekutif IESR) yang diterbitkan katadata.co.id pada tahun 2020, ia mengatakan :.

“Kebijakan energi Jokowi sering kali “setengah hati” karena harus menyeimbangkan kepentingan politik di parlemen, kepentingan birokrasi Kementerian BUMN, serta tekanan dari kelompok bisnis swasta yang sudah lama menguasai distribusi energi” (katadata.co.id 2020).

Dengan kondisi tersebut, keberanian untuk mendorong reformasi struktural Pertamina kerap tereduksi menjadi kebijakan kompromis. Struktur pemerintahan Indonesia yang bersifat presidensial tetapi sangat bergantung pada dukungan legislatif juga menimbulkan hambatan. Reformasi besar dalam sektor migas, seperti pembangunan kilang minyak baru atau restrukturisasi BUMN energi, membutuhkan persetujuan politik dan anggaran negara yang tidak mudah diperoleh.

Lebih jauh, faktor global seperti fluktuasi harga minyak dunia, pandemi COVID-19, dan tren transisi energi juga mempersempit ruang kebijakan Jokowi. Dalam data diatas maka dapat dianalisis bahwa janji politik tidak hanya berhadapan dengan realitasnya, tetapi juga keterbatasan eksternal yang membuat pencapaiannya semakin sulit tercapai. Hal ini mengindikasikan bahwa, tidak semua janji bisa direalisasikan dengan kebijakan semata, melainkan butuh peran faktor eksternal yang diluar koridor pemerintah. Seperti halnya peristiwa covid-19 yang menyebabkan kerugian yang cukup

besar bagi Pertamina. Secara keseluruhan, faktor terhambatnya realisasi janji tersebut dapat di gambarkan di tabel bawah ini.

Tabel 5. Faktor Penghambat Janji

Aspek	Realisme Janji	Faktor Penghambat (Constraining Dissensus)
Ekonomi & Kapasitas Pertamina	Ambisius, tidak realistis jika dibandingkan dengan Petronas dalam 10 tahun.	Keterbatasan kapasitas produksi minyak mentah, keterlambatan pembangunan kilang; ketergantungan impor ±600 ribu barel/hari.
Koalisi Politik	Mebutuhkan dukungan lintas partai	Jokowi bergantung pada koalisi besar (PDIP, Golkar, NasDem, dll.) yang memiliki kepentingan berbeda. Agenda reformasi energi harus dinegosiasikan.
Faktor Korupsi	Kasus pengadaan LNG (kasus Karen Agustiawan).	Korupsi yang merugikan negara hingga Rp 2,1 triliun
Anggaran & Investasi	Pembangunan kilang & infrastruktur energi butuh investasi jumbo.	Keterbatasan APBN, ketergantungan pada investor asing, serta persaingan global dalam pendanaan energi.
Faktor Eksternal	Janji sangat dipengaruhi gejala global.	Fluktuasi harga minyak dunia, pandemi COVID-19, transisi energi global mempersempit ruang kebijakan.

Secara keseluruhan data maka hal ini sesuai dengan konsep *constraining dissensus* dalam teori Janji Politik Robert Thomson yang merujuk pada adanya keterbatasan dalam menepati janji karena politisi harus menghadapi dinamika kompromi politik, tarik-menarik kepentingan koalisi, serta struktur pemerintahan yang membatasi ruang gerak kebijakan. Dan jika dianalisis secara mendalam, janji Jokowi untuk menjadikan Pertamina lebih besar dari Petronas lebih tepat dipahami sebagai janji politis berorientasi mobilisasi elektoral, ketimbang sebagai janji yang realistis dalam kerangka kebijakan. Dalam konteks janji tersebut hampir mustahil terealisasi secara penuh.

Kebutuhan akan kompromi politik dalam koalisi, struktur birokrasi BUMN yang sarat kepentingan, serta tekanan eksternal membuat janji itu berada pada ranah retorika kampanye semata ketimbang implementasi nyata. Thomson juga menegaskan didalam analisis karya ilmiahnya, bahwasannya sebuah kebohongan atau ketidakrealistisan janji

dari seorang pemimpin maupun pejabat publik bukan hanya sekedar kejahatan retorika elektoral semata, melainkan adanya niat manipulatif yang tersistematis dan terstruktur agar bisa mengelabui masyarakatnya demi keuntungan politis semata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Analisis Janji Politik Jokowi dan Realisasi 10 Tahun Kepemimpinannya (Studi Kasus PT. Pertamina Persero)”, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1) Bentuk-bentuk janji politik Joko Widodo terhadap Pertamina pada masa kampanye 2014 sangat erat dengan visi kedaulatan energi nasional. Janji tersebut meliputi pembangunan kilang minyak baru serta modernisasi kilang lama melalui program RDMP (*Refinery Development Master Plan*) dan GRR (*Grass Root Refinery*), menjadikan Pertamina sebagai operator utama blok-blok migas strategis, serta ambisi untuk membesarkan Pertamina agar mampu melampaui Petronas sebagai simbol kebanggaan nasional. 2) Realisasi janji politik tersebut dalam kurun waktu sepuluh tahun 2014-2024 menunjukkan adanya kesenjangan antara retorika kampanye dengan implementasi nyata. Program pembangunan kilang minyak mengalami keterlambatan signifikan, di mana sebagian besar proyek RDMP dan GRR belum rampung sesuai target. Pertamina memang berhasil memperkuat posisinya sebagai operator nasional dengan mengambil alih beberapa blok migas besar seperti Blok Mahakam dan Blok Rokan, namun keterbatasan teknologi, pendanaan, serta keberadaan kontrak jangka panjang dengan perusahaan asing membuat peran Pertamina belum sepenuhnya dominan. Ketiga, ambisi Jokowi untuk membesarkan Pertamina hingga melampaui Petronas terbukti belum tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- detikFinance. (2014). *Janji Jokowi-JK Besarkan Pertamina Kalahkan Petronas*.
- Fahamsyah, H. (2022). Kampung Binaan Sebagai Wujud Janji Politik Nyedulur Ala Suharwanta Di Daerah Pemilihan Bantul Timur. *JCOMENT (Journal of Community Empowerment)*, 3, 39–50.
- Hasanah, A., & Mardikantoro, B. (2017). Konstruksi Realitas Seratus Hari Pertama Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla di Media Online : Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough Abstrak. *Seloka : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(3), 233–243.
- Khairunnisa, A. (2018). *Jokowi Berambisi Bangun Kilang Minyak 2018*. KBR.

- Khotimah, K., & Kusuma, E. R. (2024). Kontestasi Wacana Politik dalam Debat Capres RI 2024 Kajian Pragma-Dialektikal. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Metalingua*, 9(1), 67–74. <https://doi.org/10.21107/metalingua.v9i1.25094>
- Luxiana, K. M. (2024). *Karen Agustiawan Didakwa Rugikan Negara USD 113 Juta di Kasus Korupsi LNG*. Detiknews.Com.
- Muhtadi, B. (2019). *Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural*. : Intrans Publishing.
- Nurfadilla, Y., & Nurdin, I. (2024). Kepemimpinan Kolaboratif dalam Momentum Pemilu 2024 Membangun Partisipasi Demokratis yang Berkelanjutan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(1), 44–49. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i1.3714>
- Pertamina. (2023). *Capaian 2023: Pertamina Raih Laba Rp 72 Triliun*.
- Petronas. (2023). *Petronas Annual Report FY2023*.
- Rasbin, D. W. L. A., Lisnawati, S. H. P. N. W. S., Izzaty, M. T., Wurini, S., & Desain. (2015). Mewujudkan Agenda Prioritas Nawacita. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Suryadi, F. R., & Nelwati, S. (2024). Mengupas Sistem Demokrasi Indonesia, Keunikan dan Perbandingan Global. *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(3), 32–39. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i3.2823>
- Wicaksono, P. E. (2014). *Jokowi-JK Janji Pertamina Jadi Operator Migas di Indonesia*. Liputan6.Com.